

# RENCANA KERJA 2021

DISTRIBUSI PARIWISATA DALAM PAD



Sumber Data Total PAD: <http://baopenda.jogjaprov.go.id/data>  
Sumber Data PAD Sektor Pariwisata: Statistik Kepariwisata



# Ringkasan Eksekutif

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 - 2024 sepenuhnya telah mengacu dan mendukung Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *outcome* dan *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

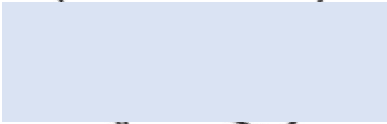
Dalam tahun 2021, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan enam sasaran kegiatan untuk kegiatan pengawasan direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan program kerja administrasi umum (PKAU) untuk kegiatan dukungan pengawasan, yang merupakan dukungan

terhadap *outcome* atas kinerja BPKP Pusat.

Dengan demikian, diharapkan Renja tahun 2021 akan menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur *outcome* dan *output* kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Yogyakarta, 2 Juni 2021

Pih Kepala Perwakilan



Bambang Kardiono

NIP. 

## BAB I PENDAHULUAN

**S**eiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Rencana Strategik (*Stratejik Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Dengan menyusun rencana kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Rencana kinerja ini berisikan ringkasan dari rencana strategik yang memuat uraian setiap sasaran dan strategi pencapaian target tahun 2021.

Demikian juga halnya Perwakilan BPKP selaku organisasi publik dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 memiliki fungsi untuk menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan tahunan untuk menjalankan tugasnya.

Untuk menjalankan strategi seperti tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran, yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya, termasuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

Terkait hal tersebut, maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kinerja tahun 2021 berupaya memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya pendukungnya, baik kegiatan yang tercantum dalam PKP2T, PKAU maupun beberapa kegiatan non PKPT yang bersifat strategis, dan secara singkat tergambar dalam lampiran rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana kinerja ini.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

**P**erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Rencana Strategis periode 2020-2024. Renstra menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek (Renja) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan setiap tahun. Pokok-pokok pikiran dalam Renstra Perwakilan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diacu dalam Renja tahun 2021 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang tidak terlepas dari Renstra BPKP Pusat seperti diuraikan dalam bab ini.

#### **Pernyataan Visi**

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan visi :

*” Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.*

Ada empat kata kunci dalam pernyataan Visi BPKP ini, yaitu (1) auditor internal pemerintah, (2) auditor berkelas dunia, (3) *trusted advisor*, dan (4) *good governance* sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah yaitu audit intern dan auditor pemerintah.

a. Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP dari definisi *The Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang *internal auditing* yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

Sesuai dengan definisi tersebut, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui layanan *assurance* dan *consulting*. Kedua layanan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Kegiatan layanan tersebut meliputi evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governance processes*). Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (~~riset sosial~~) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah RI mengacu pada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan *intern* pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa kegiatan *assurance* melalui suatu sistem pengawasan untuk menghasilkan suatu informasi akuntabilitas. BPKP juga berfungsi sebagai

---

mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan menyediakan jasa konsultasi. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU. Sehingga dapat disimpulkan, sebagai auditor pemerintah BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari Penyimpangan/KKN.

## 2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, organisasi, dan produk.

### a. Aspek SDM – Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang paling signifikan dalam organisasi. Kualitas dan kuantitas SDM BPKP akan menentukan sukses atau tidaknya BPKP dalam merealisasikan visinya. Kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia ditunjukkan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Mampu melaksanakan penugasan yang dimandatkan kepadanya dengan keahlian dan kecermatan profesional sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang merujuk pada standar audit internasional.
- 2) Berintegritas sesuai dengan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- 3) Memiliki kemampuan intelektual untuk secara terus-menerus menyerap informasi baru, beradaptasi dengan teknologi maju, dan merespon perubahan lingkungan global yang sangat cepat.

Untuk menuju profesionalisme SDM berkelas dunia, maka pengelolaan SDM di BPKP harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong

---

seluruh SDM bekerja dengan kemampuan terbaiknya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pengembangan uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yang jelas bagi setiap level internal auditor.
- 2) Perekrutan SDM yang tepat melalui proses seleksi yang tepat.
- 3) Identifikasi persyaratan penugasan dan tujuan penugasan sesuai dengan standar kinerja, *outcome* dan pengukurannya.
- 4) Orientasi SDM yang efektif, pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan profesional, dan pelatihan.
- 5) Sistem pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
- 6) Pola pengembangan karir dan promosi yang tepat.

b. Aspek Organisasi – Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme BPKP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* yang dikembangkan oleh *the IIA* sebagai peta jalan dalam mengembangkan audit internal yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan ekspektasi profesional. Karakteristik kapabilitas yang ingin dikembangkan BPKP untuk mewujudkan auditor berkelas dunia adalah sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP dalam *assurance*, *insight*, dan *objectivity* menuju peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Auditing Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang berkualifikasi secara profesional, meningkatkan koordinasi, serta meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko, serta perbaikan metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses



---

internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).

- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui sistem informasi manajemen (SIMA 4.0) yang terotomatisasi untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI, serta sinergi yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja melalui perwujudan hasil pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan K/L/P (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) BPKP memastikan bahwa independensi dan obyektivitasnya terjaga melalui mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya, dan memastikan bahwa seluruh dukungan sumber daya yang dimiliki memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola pemerintahan (*Governance Structure Element*).

c. Aspek Produk - Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi hasil pengawasan harus dihasilkan dari kegiatan pengawasan yang mengacu kepada praktik-praktik profesional yang mencerminkan dukungan kebijakan, proses, dan praktik yang memungkinkan aktivitas pengawasan dilaksanakan secara efektif dengan didukung keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*). Praktik profesional tersebut juga memastikan aktivitas pengawasan selaras dengan prioritas BPKP dan strategi manajemen risiko, dan berkontribusi pada perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) organisasi dan aktivitas

---

pengawasan dimaksud. BPKP juga memastikan bahwa aktivitas pengawasan dimonitor secara berkelanjutan dengan menggunakan proses, perangkat, dan informasi yang signifikan untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas pengawasan dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar yang berlaku.

BPKP bertekad mewujudkan hasil pengawasan, baik dari *assurance*, *insight*, maupun *objectivity* yang dapat memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan atau program pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya, sehingga sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dapat tercapai. Kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan *assurance*, *insight*, dan *objectivity* tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

d. *Trusted Advisor*

Peran BPKP dalam *assurance and consulting activities* telah menempatkan BPKP sebagai mitra strategis K/L/P/BU dalam mencapai tujuannya. Sebagai *trusted advisor*, BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya melalui komunikasi yang efektif, hubungan yang kuat, dan kemauan untuk berkembang bersama organisasi, sehingga dapat mendorong perubahan yang positif dalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan budaya organisasi unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif (*value*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP, yaitu profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan bertanggung jawab disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata *pioneer* atau perintis. *Value* tersebut diwujudkan dengan menjadi perintis dalam merintis dan mempraktikkan

pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap insan BPKP memiliki posisi yang signifikan dan strategis sebagai *agent of trusted advisor*. Untuk itu, pengembangan SDM fokus untuk mendorong terpenuhinya sembilan atribut yaitu (1) Komitmen yang tinggi terhadap etika, (2) Fokus pada hasil, (3) Keingintahuan intelektual, (4) Berpandangan terbuka, (5) Komunikator yang dinamis, (6) Hubungan yang berwawasan, (7) Pemimpin yang menginspirasi, (8) Pemikir yang kritis, dan (9) Ahli secara teknis.

e. *Good Governance* Sektor Publik

Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam mempromosikan *good governance*, yaitu: 1) *the process by which those in the authority are selected* - proses pemilihan mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan, 2) *the manner in which they exercise power in the management of public affairs* – bagaimana akuntabilitas dan kesigapan pemerintah dalam mengelola urusan publik, dan 3) *the capacity of the government machinery to manage resources and formulate and implement policies* – kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. BPKP, sesuai dengan kewenangannya, bertekad mempromosikan *good governance* sektor publik dalam dua aspek terakhir yaitu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

f. Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan negara dan daerah.

### **Pernyataan Misi**

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Rumusan misi BPKP adalah:

#### **1. Misi Pertama**

##### **Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.**

BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Misi pertama BPKP, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

##### **a. Pengawasan Intern**

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi pertama berupa pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi:

- 1) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- 2) Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau

kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan pembiayaan keuangan negara/daerah;

- 2) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 3) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- 4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- 5) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam *governance*, disamping transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan.

---

Tiga hal yang terkait dalam akuntabilitas adalah pihak yang berakuntabilitas (*accountor*), pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori (*accountee*) dan objek yang atasnya dilaporkan akuntabilitasnya. Secara organisasional, dalam kurun 2020-2024 BPKP adalah bagian dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan akuntabilitas internal kabinet menempatkan Presiden sebagai *accountee* atau pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, sebagai pihak yang mendapat amanah berupa kewenangan dan anggaran belanja dan atau anggaran pendapatan menjadi pihak yang berakuntabilitas (*accountor*). Adapun objek akuntabilitasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan kewenangan dan anggaran yang diberikan. Jadi, ini termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan substantif pembangunan sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

BPKP disamping harus berakuntabilitas sebagai dirinya sendiri, dalam fungsinya sebagai pengawas intern adalah mata dan telinga Presiden yang sekaligus menjadi mediator informasi dari *accountor* ke *accountee*. Fungsi *assurance* yang dijalankan oleh BPKP adalah terutama untuk memberi jaminan memadai akan kewajaran informasi akuntabilitas yang diberikan oleh *accountor* kepada *accountee*. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, BPKP dapat menjalankan fungsi *consultancy*, misalnya dalam mengembangkan sistem pengendalian intern atau manajemen risiko.

*Adapun tingkatan akuntabilitas yang menjadi cakupan kewajiban accountor dan berpotensi menjadi objek pengawasan assurance dan consultancy BPKP adalah empat tangga akuntabilitas entitas politik/publik yang diperkenalkan oleh Stewart (1984, hlm.17–18). Keempat tangga itu adalah:*

---

*Tangga paling dasar, dari akuntabilitas suatu entitas politik/publik akuntabilitas adalah* pertanggungjawaban tentang kejujuran (*probity*) dan legalitas. Ini terutama merupakan pertanggungjawaban tentang penerimaan dan penggunaan uang yang dipercayakan kepada entitas untuk menunjukkan bahwa ia memenuhi persyaratan, paling tidak kepatuhan dengan hukum terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang itu.

Pada anak tangga kedua adalah akuntabilitas proses yang memberikan informasi proses internal melalui mana suatu entitas melakukan tugasnya untuk mengkonversi input menjadi output dan hasil. Jadi di sini akan dilihat cara pemrosesan dengan kaca mata standar pemrosesan yang ditetapkan.

Tangga ketiga adalah akuntabilitas kinerja yang terkait dengan transparansi kinerja yang diharapkan dan aktual yang dicapai terkait dengan tujuan entitas terutama dalam hal hasil akan datang. Capaian output dan outcome dari kegiatan akan menjadi nilai atas akuntabilitas kinerja ini.

Akhirnya, pada tangga keempat, akuntabilitas kebijakan dan program akan terkait dengan informasi yang lebih luas yaitu informasi tentang kebijakan yang mengarahkan entitas pelapor dan program yang sedang disasarnya dalam kerangka waktu tertentu. Jadi, ini adalah akuntabilitas puncak setingkat program yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan politik. Di dalam kerangka politik pembangunan Indonesia, hal ini berarti akuntabilitas atas capaian kinerja program prioritas dalam RPJMN atau RKP.

Mengingat sifat akuntabilitas ini semakin ke puncak semakin luas dan makro, maka aspek yang dinilai dari suatu program adalah aspek yang sedapat mungkin komprehensif memberi pemahaman seluruh keberadaan program itu. Hal ini dapat mencakup sejak perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauannya.



Ukuran akuntabilitasnya, mengikuti Koppel (2005) dapat mencakup sebagian atau keseluruhan dimensi transparansi, liabilitas, kontrolabilitas, dan responsibilitas.

Jadi, pengawasan intern oleh BPKP bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah hingga ke akuntabilitas program pembangunan nasional. Dengan kata lain, nilai tambah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh kementerian dan lembaga pemerintah dalam merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan perolehan serta penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan hingga ke capaian kinerjanya yang dikaitkan dengan program pembangunan yang sudah ditetapkan secara politis. Jasa *consultancy* BPKP diwujudkan dalam pemberian rekomendasi yang strategis yaitu rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L/P/BU sebagai mitra kerja BPKP.

Dengan informasi *assurance* tersebut dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasan intern, BPKP seyogyanya dapat berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan atau kecurangan pengelolaan keuangan, inefisiensi dan ketidakefektifan output dan *outcome* dan capaian kinerja program yang dapat berujung pada kegagalan memperoleh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kurang berkualitas dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020–2024.

c. Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

---

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Negara didefinisikan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2015 sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sementara Pembangunan Nasional menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ruang lingkup pengawasan meliputi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

## 2. Misi Kedua

### **Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.**

Misi kedua ini merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. *Enablers* 'memampukan' pengawasan pembangunan yang menjadi *core business* BPKP dapat terlaksana dengan efisien dan memastikan bahwa seluruh warga BPKP bergerak menuju tujuan yang sama. Misi ini meliputi dua hal, yakni: (a) pengembangan SDM pengawasan berkualitas yang ada pada internal

---

BPKP; dan (b) pengembangan SDM Pengawasan pada APIP diluar BPKP (APIP K/L/D).

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu integritas dan kultur; kinerja dan kesejahteraan; metode kerja dan inovasi; sumber daya fisik dan keuangan; teknologi informasi dan komunikasi; serta hubungan publik dan kolaborasi.

a. Integritas dan kultur.

Membangun/mewujudkan SDM yang berintegritas sesuai dengan nilai dan budaya organisasi yang akan memampukan BPKP dalam mencapai tujuannya. Integritas merupakan nilai penting yang harus dimiliki insan BPKP untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Berintegritas berarti:

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Sementara pengembangan kultur atau budaya organisasi diharapkan dapat mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi dan menjembatani perbedaan budaya antar generasi.

b. Kinerja dan Kesejahteraan.

Menciptakan lingkungan kerja yang memampukan SDM untuk berkinerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya dengan mengupayakan keseimbangan antara prestasi dan *reward*. Kinerja dan kesejahteraan dibangun dengan prinsip berikut.

- Adanya uraian jabatan yang mendeskripsikan pekerjaan dan atribut-atributnya dengan jelas.
  - Proses rekrutmen pegawai yang tepat.
  - Adanya tuntutan dan tujuan pekerjaan yang jelas sesuai dengan standar kinerja yang dapat diukur.
  - Adanya metode pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesi, dan pelatihan sesuai dengan standar.
  - Adanya pendampingan terhadap pegawai dan pemberian feedback atas kinerja pegawai secara berkelanjutan.
  - Adanya sistem pengakuan atas kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
  - Adanya kesempatan pengembangan karir dan promosi yang tepat.
- c. Metode Kerja dan Inovasi.  
Menciptakan dan mengembangkan metode kerja dan inovasi secara berkelanjutan yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan tupoksinya dengan efektif dan efisien serta dengan memperhatikan keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*).
- d. Sumber daya fisik dan keuangan.  
Menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar profesional, dan agar dapat berkinerja secara efektif dan independen.
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi.  
Membangun teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan BPKP dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnisnya secara efektif dan efisien.

f. Hubungan publik dan kolaborasi.

Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

## Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. BPKP menetapkan dua tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2021 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.

## BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2021

**R**encana kinerja tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

### **Sasaran Kegiatan yang Mendukung Sasaran Program dan Sasaran Strategis BPKP**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sasaran kegiatan dan indikatornya. Sasaran kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran srategis dan sasaran program hanya ada di BPKP Pusat, untuk mendukung sasaran strategis dan sasaran program BPKP, Perwakilan BPKP DIY mendapat amanah melaksanakan sasaran kegiatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan  
 Program Pengawasan Pembangunan Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
		Uraian	Target
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi (juta)	468.000.000
		Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi (juta)	779.000000
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah (juta)	186.779.000.000
		Nilai penyelamatan keuangan Negara (juta)	81.357.000.000
		Penyelamatan pengelolaan dana transfer	118.000.000
		Nilai Penyelamatan pembiayaan Daerah	59.000.000
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PP sesuai target	2
		Jumlah KP yang diawasi	7
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	7
		Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	1
		Jumlah Program Lintas Sektor (PLS) yang tercapai sesuai target	1
		Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil baik	25%
		Presentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	80%
3.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	1
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	11
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	16
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100%
		Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	75%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Uraian	Target
5. Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/Badan Usaha	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	12
	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	12
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	1
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	2
	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1,11%
	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	1
	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	50,02%
	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	2
	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan Aset secara memadai	57
	Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	2

Tabel 3.2

## Indikator Kinerja Kegiatan

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Uraian	Target
1. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	76
	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100%
	Skor IKPA Unit Kerja	87
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	91%



	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100 %
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	81
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3
	Indeks MR	Level 3
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	76
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	73

## Sasaran Kegiatan 1

### Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah mencerminkan anggaran daerah yang dikelola memiliki manfaat untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.
2. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi.
3. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah.
4. Nilai penyelamatan keuangan Negara.

## Sasaran Kegiatan 2

---

### Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Sasaran Kegiatan meningkatnya pengawasan pembangunan atas Pembangunan Nasional merupakan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah dan/atau subsidi pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah KP yang diawasi
2. Jumlah KP yang tercapai sesuai target
3. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
4. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

## Sasaran Kegiatan 3

---

### Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha merupakan pengawasan terhadap akuntabilitas tata kelola Badan Usaha dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah atau subsidi pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

---

## Sasaran Kegiatan 4

---

### Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada upaya penindakan dimana hal ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP 2005 -2025). Oleh karena itu BPKP berupaya mendorong K/L/P/Badan Usaha untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi melalui pengukuran efektifitas pencegahan korupsi, yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa skor Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (EPK).

Indeks EPK mengintegrasikan berbagai kegiatan pencegahan korupsi sekaligus meyakini bahwa rencana dan realisasi kegiatan yang dilakukan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.
2. Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

## Sasaran Kegiatan 5

---

### Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/Badan Usaha

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU dilakukan dengan melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan Manajemen Risiko, pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) maupun Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMD/BULD. Sasaran Kegiatan tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko, SPIP, serta tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan delapan indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3.
2. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3.
3. Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI  $\geq$  Level 3.
4. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI  $\geq$  Level 3.
5. Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
6. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan.
8. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes.

## Sasaran Kegiatan 6

### Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Ketatausahaan dilakukan dengan melaksanakan tata kelola unit kerja, menyelenggarakan pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel, dan menyelenggarakan pengendalian intern unit kerja. Sasaran kegiatan tersebut mencerminkan tingkat reputasi dan tingkat kepuasan layanan unit kerja.

Keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan 12 indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok kinerja pelayanan ketatausahaan utama, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari skor Zona Integritas, pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi dan administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu.

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), ketepatan waktu penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM), penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

## 3. Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Kerja.

Indikator ini diukur dengan capaian maturitas SPIP dan Indeks MR unit kerja.

## 4. Meningkatnya Kepuasan Layanan Unit Kerja.

Indikator ini diukur dari indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja dan kepuasan layanan unit kerja.

## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2021 memuat 6 sasaran kegiatan dengan 13 kegiatan yang dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp	468.000.000
		1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp	779.000.000
		1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp	186.779.000.000
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp	81.357.000.000
		1.5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp	118.000.000
		1.6 Nilai penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp	59.000.000
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP	2
		2.2 Jumlah KP yang diawasi	KP	7
		2.3 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7
		2.4 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	KP	1
		2.5 Jumlah Program Lintas Sektor yang	PSN	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		tercapai sesuai target		
		2.6 Presentase Desa yang diaudit Kinerja dengan hasil baik	%	25%
		2.7 Presentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	80%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat		11
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	16
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	75
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	12
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Pemda	12
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	1
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	2
		5.5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	1.11
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	50.02
		5.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan Aset desa secara memadai	Desa	57
		5.9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2
		5.10 Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD	2
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan"	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	76
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Unit Kerja	6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor	87
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	91
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	81
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3
		6.11 Indeks MR	Nilai	Level 3
		6.12 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja		76
		6.13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	73
		Anggaran Pengawasan Pembangunan		Rp
	Anggaran Dukungan Manajemen		Rp	29.971.149.000,00
	Jumlah		Rp	31.000.965.000,00

## BAB IV PENUTUP

**R**encana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang berjangka waktu lima tahun (2020 – 2024). Rencana kinerja 2021 memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya.

Dokumen ini memuat program–program dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Indikator–indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan–kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Rencana awal Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 akan melaksanakan 147 kegiatan dalam 2 program untuk mencapai 6 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dokumen ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta selama tahun 2021.



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				Realisasi Kinerja				No.	KEGIATAN UTAMA		RISIKO UTAMA/		ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target				
					TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		Nama Tema	Jml PP/ Keg	PERNYATAAN	NILAI				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>BIDANG IPP</b>																									
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Rp	0	0	0	0	0																	
2		Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rp	0	0	0	0	0																	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP	2	0	0	0	2						1	Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Periode Triwulan I Tahun 2021	3	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam pengusutan Assurance Auditi menolak/membatasi pengusutan pengawasan	13	34,837,500		Laporan	3			
															2	Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor ATR BPN Periode Triwulan I Tahun 2021	2	23,225,000			2				
															3	Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor Perhubungan Periode Triwulan I Tahun 2021	2	23,225,000			2				
															4	Pengawasan atas Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	3	55,896,000			1				
															5	Pengawasan atas tata kelola Program Bantuan Sosial atas Penyaluran Kartu Sembako pada Kementerian Sosial	1	25,046,000			1				
															6	Pengawasan terhadap Program for Result (P for R) untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial (Social Assistance Reform) Tahun 2020 pada Kementerian Sosial	1	14,384,000			1				
															7	Pengawasan atas tata kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial	1	25,046,000			1				
															8	Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Kementerian Sosial	1	25,046,000			1				
															9	Bimtek dan QA Maturitas MR pada kementerian/lembaga mitra	1	16,810,000			1				
															10	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bencana dan tata kelolanya	3	98,347,000			3				
															11	Pengawasan tata kelola vaksinasi tahap I dan 2	1	25,046,000			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
														12	Pengawasan Tata Kelola PSN pada Kemenpar keraf	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance		11,612,500						1		
															20			378,521,000									
<b>BIDANG APD dan P3A</b>																											
	1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (juta)	468	0	468	0	0						1	Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pengawasan atas Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1	- OPD tidak melakukan update wajib pajak daerah - Penetapan target PAD tidak memperhatikan potensi PAD	16	15,150,000	APD	Laporan	-	1	-	-	
			Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (juta)	779	0	779	0								2	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	Program/kegiatan OPD tidak efektif dan efisien (tidak selaras dengan RPJMD)	20	14,657,000	APD	Laporan	-	1	-	
			Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rp (juta)	185,428		61,800	123,614	185,428								3	Pengawasan atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	1	- Penyampaian dokumen pengajuan penyaluran anggaran terlambat - Penggunaan anggaran tidak sesuai prioritas	16	15,331,000	APD	Laporan	1	-	
			Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rp (juta)	118		118		30.57								4	Pengawasan atas Dana Transfer	1	- Penyampaian dokumen pengajuan penyaluran anggaran terlambat - Penggunaan anggaran tidak sesuai petunjuk teknis dana transfer	16	15,150,000	APD	Laporan	1	-	
			Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp (juta)	59			59										Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah			20	-	APD	Laporan	-	-	
	2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	KP	7	2	4	6	7	2					1	Peningkatan kualitas pengelolaan aset desa	1	- Pengelolaan aset desa tidak akuntable	20	15,331,000	APD	Laporan	-	1	-		
			Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	2	4	6	7	2								Peningkatan kualitas pengelolaan aset desa			20						
			Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai	PLS	1	0	0	0	1									Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan	1	- Pengadaan sarana prasarana tidak mendukung kebutuhan prioritas pendidikan - Materi ajar tidak memenuhi kebutuhan dunia usaha/kerja	20	15,150,000	APD	Laporan	1	-	
			Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil "Baik"	%	25	0	0	0	25									Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah			20						
																		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah			16						
																		Pengawasan atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa			16						
	3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	12	12	12	12	12	12								1	Pengawasan terhadap kapabilitas APIP	2	Subtansi infrastruktur tidak sesuai dengan ketentuan IACM	23	38,663,000	P3A	Laporan	1	1
																		2	Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan kualitas pengelolaan JFA	3	tidak semua ketentuan ke JFA an tersampaikan	14	10,000,000	P3A	Laporan		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Pemda	12	12	12	12	12	12					3	Pengawasan Manajemen Risiko atas pembinaan APIP	1	hasil bimtek tidak diaplikasikan oleh APIP	19	28,050,000	P3A	Laporan	1				
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	1			1	1						1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah	1	OPD tidak melaporkan laporan penggunaan dana secara tepat waktu dan akurat	16	14,157,000	APD	Laporan	1	-	-	-	
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	2			1	2						2	Pengawasan terhadap MRI atas Pengendalian Intern	1	MRI belum menjadi prioritas dan komitmen bagi Pemda	20	23,196,000	APD	Laporan	-	1	-	-	
		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	1.11				1.11						3	Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Pemda	1	Kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja kurang memadai	16	14,157,000	APD	Laporan	-	1	-	-	
		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1				1						4	Pengelolaan Risiko Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY	1	- Ketidaksetaraan perlakuan terhadap desa/kalurahan - Rumusan baku (50%, 30%, 10%, 10%) penilaian desa/kalurahan mandiri budaya tidak mencerminkan keadilan	16	22,180,000	APD	Laporan	1	-	-	-	
		Persentase jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	50.02	25	50.00	50.02	50.02	94.09					5	Kajian Anomali Antara Angka Kemiskinan, Pengangguran, Gini Ratio dan Indeks Kebahagiaan dan Angka Harapan Hidup Masyarakat di Wilayah DIY	2	Tidak terdapat anomali antara Antara Angka Kemiskinan, Pengangguran, Gini Ratio dan Indeks Kebahagiaan dan Angka Harapan Hidup Masyarakat di Wilayah DIY	9	60,360,000	APD	Laporan	1	1	-	-	
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	Desa	57			32	57	16					6	Kompilasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa	1	Pengelolaan dana desa tidak memanfaatkan aplikasi siskeudes dengan baik	16	15,331,000	APD	Laporan	-	1	-	-	
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2	2	2	2	2	2						Peningkatan kualitas pengelolaan aset desa		- Pengelolaan aset desa tidak akuntabel	20				-	-	-	-	
															Kompilasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa		Pengelolaan dana desa tidak memanfaatkan aplikasi siskeudes dengan baik	16				-	-	-	-	
																19		316,863,000								
<b>BIDANG AKUNTAN NEGARA</b>																										
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1		1	1	1						1.1	Pengawasan terhadap tata kelola PSN badan usaha konektivitas, pariwisata, kawasan industri dan perumahan	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	12	12,000,000	Korwas AN	Laporan		1			
															1.2	Pengawasan terhadap Tata Kelola PSN SPAM dan LRT	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	12	12,380,000	Korwas AN	Laporan		1		
															1.3	Pengawasan Penyaluran Insentif dan Santunan Nakes	1	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)	12	12,380,000	Korwas AN	Laporan	1	0		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	1	1	1	1					2.1	Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Pembayaran klaim rumah sakit yang menangani COVID-19	1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	8	16,640,000	Korwas AN	Laporan				1	
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	0	0	11	11						2.2	Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Jasa Air	1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	8	15,300,000	Korwas AN	Laporan		1			
														2.3	Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Aneka Usaha	1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	8	15,300,000	Korwas AN	Laporan		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	0	1	1	1					2.4	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLUD	1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	8	15,300,000	Korwas AN	Laporan			1		
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	16	0	0	0	16					2.5	Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	12	15,300,000	Korwas AN	Laporan			1		
													2.6	Peran BUMD/BUMDES sebagai penggerak perekonomian Kabupaten/Desa	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	12	31,686,000	Korwas AN	Laporan				1	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	0	0	0	0	0																	
		Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	0	0	0	0	0																	
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	2	0	0	0	2					3.1	Pengawasan terhadap Maturitas Manajemen Risiko pada BUMD	1	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal	12	19,400,000	Korwas AN	Laporan			1		
		Jumlah BUMD dengan Kapasitas Satuan Pengawas Intern ≥ Level 3	BLUD	0	0	0	0	0																	
		Jumlah BLUD dengan Kapasitas Satuan Pengawas Intern ≥ Level 3	BUMD	0	0	0	0	0																	
															10			165,686,000							
<b>BIDANG INVESTIGASI</b>			BLUD																						
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (juta)	1,351	675,5	0	0	675,5					1	Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	29,942,000	Korwas Investigasi	Laporan	1	0	0	0	0
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (juta)	81,357	0	0	0	81,357					2	Pengawasan keinvestigasian atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Institusi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	20,133,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	0	1
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	80	0	0	0	80					3	Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	22,113,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	0	1
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	0	0	100	0					4	Pengawasan keinvestigasian atas penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	20,133,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	0	1
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	75	0	0	75	0					5	Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	2,684,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	1	0	0	0
		Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi "Bak"	Pemda	0	0	0	0	0					6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi (FCP)	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	20,133,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	1	0	0
		Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi "Bak"	BU	0	0	0	0	0					7	Pengawasan PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Program Prioritas ke-3 : Infrastruktur Perkotaan	1	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8	22,608,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	0	1	0	0
													8	Pencegahan terjadinya korupsi (preventif) di desa dengan melakukan kegiatan fraud risk assessment (FRA) dana desa salah satu desa di DI Yogyakarta	1	Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	8	31,000,000	Korwas Investigasi	Laporan	0	1	0	0	0
													9	Peningkatan Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	0	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8		Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	0	0
													10	Peningkatan Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	0	Penugasan Investigasi berlarut-larut	8		Korwas Investigasi	Laporan	0	0	0	0	0
															8			168,746,000							
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																									
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	76	0	0	0	76					1	Sosialisasi Penerapan Aplikasi Pengaduan dalam rangka penilaian ZI pada Unit Kerja	1	Penilaian belum memenuhi standar minimal yang dibutuhkan	6	3,203,130,000	Kabag Tata Usaha						1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	25	50	75	100	67.07					2	Koordinasi dengan Biro SDM	4	Tidak terpenuhinya pegawai yang sesuai standar kompetensi pegawai	6	21,000,000	Subkor Kepegawaian	Kegiatan	1	1	1	1
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100					3	Pencatatan administrasi SDM yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	4	Keterlambatan proses administrasi SDM	8	72,796,000	Subkor Kepegawaian	Kegiatan	1	1	1	1
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	0	0	0	100						4	Konsultasi Penyusunan dan Revisi DIPA dengan Kanwil DJPB Prov. DIY	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	4	36,862,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan			1	1
													5	Konsultasi Penyusunan RKA dengan Kantor Pusat	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	15	15,265,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan			1	1	
		Skor IKPA Unit Kerja	Skor	87	0	0	0	87					6	Pemrosesan dan Sosialisasi Revisi DIPA di Kanwil DJPB Prov. DIY	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	6	3,600,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan			1	1	
													7	Konsultasi Pelaksanaan Anggaran dengan KPPN	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	6	2,137,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan			1	1	
		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	91	91	91	91	91	100				8	Konsultasi Verifikasi Keuangan dengan KPPN	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	10	16,962,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan		1	1		
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	0	0	0	100				9	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	6	15,265,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan	1			1	
													10	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan KPPN	2	Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan	10	3,632,000	Sub Koordinator Keuangan	Kegiatan	1			1	
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik				Baik					11	Konsultasi pengelolaan BMN dengan KPKNL	4	Pengelolaan BMN tidak sesuai peraturan	6	82,321,000	Kasubag Umum	Kegiatan	1	1	1	1	
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	81	0	0	0	81					12	Konsultasi Penilaian SAKIP ke Deputi PKD	1	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan	9	26,287,719,000	Kabag Tata Usaha					1	
		Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3				Level 3					13	Penyusunan Aplikasi Pengaduan	1	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan	9	46,430,000	Kabag Tata Usaha					1	
		Indeks MR Unit Kerja	Nilai	Level 3				Level 3					14	Penilaian Risiko Unit	2	Pelaksanaan Penilaian	12	10,743,000	Kabag Tata Usaha					1	
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	76	0	0	0	76					15	Survei Kepuasan Pegawai	1	Pelaksanaan survei	9	96,146,000	Kabag Tata Usaha					1	
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	73	0	0	0	73					16	Survei Kepuasan kepada Stakeholder	1	Pelaksanaan survei	9	57,141,000	Kabag Tata Usaha					1	
															147		131	29,971,149,000							
																		31,000,965,000							